

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stabilitas bank mencerminkan kemampuan sistem perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi secara optimal tanpa terguncang oleh tekanan internal maupun eksternal. Ketika bank tetap stabil, mereka dapat menjaga kepercayaan masyarakat, melindungi dana pihak ketiga, serta menyalurkan kredit meskipun tekanan ekonomi meningkat. Di Indonesia, stabilitas perbankan sangat penting karena lebih dari 75% intermediasi keuangan masih bertumpu pada sektor ini. Selain faktor modal dan profitabilitas, stabilitas juga mencerminkan kapasitas menyerap kerugian dan mendukung perekonomian riil, terutama saat menghadapi krisis global, pandemi, atau fluktuasi suku bunga.

Salah satu indikator utama untuk menilai stabilitas bank adalah *Z-score*, yang mengukur jarak aman terhadap kegagalan dengan mempertimbangkan rasio permodalan, profitabilitas, dan volatilitas laba (σ ROA). Semakin tinggi nilai *Z-score*, semakin rendah probabilitas bank mengalami kegagalan. Nilai-nilai ini mencerminkan daya tahan bank dalam kondisi turbulensi.

Tren **Z-score** bank-bank di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, sebelum pandemi, *Z-score* berada di angka 17,17%, lalu menurun pada 2020 menjadi 16,85% akibat tekanan global dan meningkatnya beban kredit bermasalah. Namun sejak 2021, tren *Z-score* kembali meningkat, mencerminkan proses pemulihan dan penguatan manajemen

risiko di sektor perbankan. Tabel berikut menunjukkan perkembangan Z-score bank di Indonesia sebagai gambaran agregat stabilitas perbankan nasional:

Tabel 1. 1 Perkembangan Z-score Bank di Indonesia

Tahun	Hasil Stabilitas Bank
2019	17,17%
2020	16,85%
2021	18,23%
2022	18,72%
2023	19,06%

Sumber: Perhitungan Penulis dari Laporan Keuangan BI

Meski kenaikannya tidak drastis, konsistensi perbaikan ini menjadi sinyal positif terhadap ketahanan struktur keuangan nasional di tengah ketidakpastian global. Namun demikian, peningkatan Z-score bukan berarti seluruh bank sudah dalam kondisi aman dan bebas risiko. Tantangan eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, tekanan suku bunga global, dan risiko geopolitik tetap menjadi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas. Selain itu, digitalisasi dan disrupsi teknologi finansial juga memunculkan tantangan baru dalam tata kelola dan perlindungan data. Oleh sebab itu, penguatan stabilitas bank tidak hanya bergantung pada angka-angka keuangan, namun juga pada kesiapan institusional, tata kelola risiko, dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Dalam hal ini, pemantauan dan pengelolaan sejumlah indikator keuangan utama perlu dilakukan secara rutin dan mendalam untuk memastikan kestabilan tetap terjaga. Indikator-indikator tersebut mencakup risiko kredit, likuiditas, efisiensi operasional, dan margin keuntungan yang saling berpengaruh satu sama lain.

Faktor-faktor utama yang memengaruhi stabilitas bank tersebut antara lain adalah Non-Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net Interest Margin

(NIM). Rasio NPL mencerminkan kualitas kredit yang disalurkan—semakin tinggi NPL, semakin besar risiko kerugian dan pelemahan modal bank. LDR menunjukkan tingkat penyaluran kredit dibandingkan dana yang dihimpun; nilai yang terlalu tinggi berisiko menimbulkan tekanan likuiditas, sementara terlalu rendah bisa mengindikasikan lemahnya fungsi intermediasi. BOPO menjadi cerminan efisiensi; BOPO tinggi menunjukkan bahwa biaya operasional menggerus pendapatan, yang pada akhirnya dapat menekan laba dan Z-score. Di sisi lain, NIM menunjukkan kemampuan bank memperoleh pendapatan dari selisih bunga, dan menjadi sumber utama ketahanan finansial. Keempat indikator ini harus dijaga dalam batas optimal untuk memastikan stabilitas perbankan tetap terpelihara di tengah tantangan ekonomi.

Risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan operasional bank dan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kestabilan sistem keuangan. Dalam konteks manajemen bank, risiko harus dipantau, diidentifikasi, dan dikendalikan secara menyeluruh agar tidak berkembang menjadi ancaman sistemik. Setiap keputusan strategis dalam penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan pengelolaan portofolio memiliki konsekuensi terhadap eksposur risiko. Apabila pengelolaan risiko tidak dilakukan secara hati-hati, bank dapat mengalami penurunan kualitas aset, krisis likuiditas, hingga gangguan fungsi intermediasi. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk memiliki sistem mitigasi risiko yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan terukur. Empat jenis risiko utama dalam perbankan akan dibahas lebih lanjut berikut ini.

Risiko kredit menjadi fokus utama dalam perbankan karena menyangkut kualitas aset produktif yang dimiliki bank. Ketika nasabah gagal membayar kewajibannya, bank tidak hanya kehilangan pendapatan bunga, tetapi juga harus menyediakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang dapat menekan laba. Rasio Non-Performing Loan (NPL) digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur risiko kredit. Data OJK menunjukkan bahwa per akhir 2023, NPL bruto industri perbankan nasional masih berada di bawah ambang batas 5%, meski beberapa kelompok bank menghadapi tekanan lebih tinggi, terutama pada sektor UMKM (OJK - Statistik Perbankan). Untuk menjaga agar NPL tetap rendah, bank perlu mengoptimalkan proses analisis kredit, monitoring debitur, serta melakukan restrukturisasi yang tepat jika diperlukan. Kualitas kredit yang terjaga akan membantu menopang profitabilitas dan memperkuat stabilitas jangka panjang.

Risiko likuiditas terjadi ketika bank kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti penarikan dana oleh nasabah atau pembayaran utang jatuh tempo. Ketidakseimbangan antara dana yang dihimpun dengan yang disalurkan sebagai kredit dapat menyebabkan tekanan likuiditas, yang pada skala besar bisa berdampak sistemik. Loan to Deposit Ratio (LDR) menjadi alat ukur untuk menilai kemampuan likuiditas bank secara proporsional. Menurut BI, rasio LDR ideal berada di antara 78% hingga 92%, mencerminkan intermediasi yang sehat tanpa mengorbankan kestabilan dana (BI - Indikator Makroekonomi). LDR yang terlalu tinggi mengindikasikan likuiditas yang ketat dan bisa menimbulkan risiko ketika terjadi lonjakan penarikan dana. Oleh karena itu, pengaturan LDR yang

bijak menjadi strategi penting dalam mengelola keseimbangan antara ekspansi kredit dan perlindungan likuiditas.

Risiko operasional berkaitan erat dengan efisiensi kegiatan operasional bank dan kemampuan menghasilkan laba bersih setelah biaya. Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) digunakan untuk melihat sejauh mana bank dapat mengelola beban biayanya. BOPO yang tinggi menandakan bahwa sebagian besar pendapatan bank terserap untuk menutupi biaya, yang berarti efisiensi operasional masih rendah. Menurut data OJK, perbankan Indonesia menunjukkan rata-rata BOPO antara 78%–88% tergantung klasifikasi bank, namun BOPO di atas 90% dianggap berisiko terhadap profitabilitas (OJK - Statistik Perbankan). Efisiensi yang rendah akan mempersempit ruang untuk menyerap risiko lain seperti kredit bermasalah dan tekanan bunga. Oleh karena itu, manajemen operasional yang disiplin dan berbasis data menjadi fondasi dalam penguatan ketahanan bank.

Risiko profitabilitas dalam industri perbankan salah satunya tercermin dari fluktuasi pendapatan bunga bersih, yang diukur melalui rasio Net Interest Margin (NIM). NIM menggambarkan kemampuan bank menghasilkan margin dari selisih bunga kredit yang diterima dengan bunga dana yang dibayarkan. NIM yang stabil menunjukkan bahwa bank mampu mempertahankan pendapatan bunga meskipun terjadi dinamika pasar. Dalam laporan BI, NIM perbankan Indonesia relatif terjaga di kisaran 4%–5%, namun tekanan biaya dana dan persaingan suku bunga membuat margin ini terus terancam menurun (BI - Kajian Stabilitas Keuangan). Jika NIM turun drastis, pendapatan operasional juga akan terdampak dan dapat

memperburuk kondisi keuangan bank, terutama jika dikombinasikan dengan BOPO tinggi. Maka dari itu, strategi pengelolaan pricing kredit dan dana menjadi penting dalam menjaga risiko pasar tetap terkendali.

Keterkaitan antar-risiko sangat penting untuk dipahami karena satu indikator yang memburuk bisa memperparah kondisi lainnya. Misalnya, NPL yang meningkat akan mendorong biaya pencadangan naik, yang bisa menyebabkan BOPO melonjak dan pada akhirnya menekan laba bersih. LDR yang tinggi, jika tidak diimbangi dengan kualitas kredit yang baik, juga dapat memperbesar risiko kredit dan mengganggu likuiditas. Begitu juga tekanan NIM akibat kenaikan biaya dana akan mempersempit ruang bank dalam menyerap fluktuasi operasional. Oleh sebab itu, pendekatan manajemen risiko harus menyeluruh dan berbasis sistem, tidak bisa dilakukan secara terpisah. Bank harus menyusun strategi mitigasi yang saling terintegrasi untuk menjaga kesinambungan stabilitas.

Regulasi dan pengawasan dari otoritas juga berperan penting dalam mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif di sektor perbankan. OJK melalui pendekatan Risk-Based Bank Rating (RBBR) mewajibkan bank untuk mengevaluasi profil risikonya secara periodik, termasuk indikator NPL, LDR, BOPO, dan NIM sebagai bagian dari komponen penilaian risiko keuangan (OJK -

Penilaian Risiko). Bank Indonesia juga terus mendorong kebijakan makroprudensial yang proaktif melalui pengaturan likuiditas dan suku bunga acuan yang mendukung stabilitas sistem keuangan. Kolaborasi antara regulator dan pelaku industri menjadi penting dalam merespons risiko yang bersifat dinamis dan multidimensi. Keberhasilan bank dalam mengelola risiko bukan hanya

mencerminkan ketahanan internal, tetapi juga kontribusinya terhadap ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penguatan budaya risiko dan sistem pengawasan harus terus menjadi prioritas dalam transformasi perbankan Indonesia.

Pertumbuhan kredit mencerminkan sejauh mana bank menjalankan fungsi intermediasinya dalam menyalurkan dana kepada sektor riil. Ketika kredit tumbuh secara stabil, hal ini mengindikasikan bahwa bank memiliki kemampuan untuk menyalurkan pinjaman secara sehat, dan masyarakat juga memiliki kapasitas untuk meminjam. Di sisi lain, kredit yang melambat bisa menjadi sinyal kehati-hatian bank terhadap kondisi ekonomi atau risiko gagal bayar yang meningkat. Selama lima tahun terakhir, tren pertumbuhan kredit di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Berikut adalah data pertumbuhan kredit nasional berdasarkan tahun:

Tabel 1.2 data Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia

Tahun	Pertumbuhan Kredit
2019	6,08%
2020	3,11%
2021	5,24%
2022	11,35%
2023	10,38%

Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia

Data tersebut menunjukkan pemulihan tajam pasca-pandemi, meski laju pertumbuhannya mulai stabil kembali pada tahun 2023.

Pada tahun 2020, pertumbuhan kredit turun signifikan karena pandemi menyebabkan pelemahan permintaan dan kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan. Banyak sektor usaha mengalami kontraksi, sehingga risiko kredit meningkat dan permintaan kredit pun menurun. Namun, kondisi ini mulai

membaik pada tahun 2021 dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan membaiknya daya beli masyarakat. Kredit kembali menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional, khususnya melalui sektor perdagangan, industri pengolahan, dan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan kredit 2022 yang menembus 11,35% mencerminkan kepercayaan yang mulai pulih di kalangan dunia usaha dan masyarakat. Tren ini menjadi sinyal bahwa bank mulai meningkatkan kembali ekspansi kredit ke berbagai sektor produktif.

Meski tahun 2023 menunjukkan sedikit penurunan dari 2022, pertumbuhan kredit sebesar 10,38% tetap tergolong tinggi dan sehat. Hal ini menandakan bahwa bank masih aktif menyalurkan pembiayaan namun dengan pendekatan yang lebih selektif. Kondisi ini wajar, mengingat tekanan global dan ketidakpastian ekonomi tetap menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan kredit. Bank tidak hanya mengejar volume kredit, tetapi juga menjaga kualitas portofolio pinjamannya agar tidak menimbulkan lonjakan risiko di kemudian hari. Penyaluran kredit pun cenderung diarahkan ke segmen-segmen dengan risiko yang terkendali dan prospek pembayaran yang baik. Maka dari itu, pertumbuhan yang moderat dan terkendali menjadi pola yang paling masuk akal dalam menjaga stabilitas.

Pertumbuhan kredit juga berkaitan erat dengan kondisi dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun bank. Jika DPK tumbuh stabil, maka bank memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk memperluas pembiayaan. Namun jika DPK tumbuh lebih lambat daripada kredit, bank bisa mengalami tekanan pada likuiditas yang dapat mengganggu intermediasi. Oleh karena itu, pertumbuhan kredit tidak dapat

dilihat secara tunggal, tapi harus dipertimbangkan bersama indikator lain seperti LDR dan komposisi sumber pendanaan. Pada periode 2022–2023, DPK masih tumbuh, namun laju pertumbuhannya cenderung lebih rendah dari kredit. Maka, keseimbangan antara penyaluran kredit dan penghimpunan dana menjadi sangat penting untuk dijaga.

Selain faktor internal bank, kondisi eksternal seperti permintaan pembiayaan, daya beli, dan aktivitas investasi turut menentukan arah pertumbuhan kredit. Ketika sektor riil mengalami ekspansi, permintaan terhadap kredit modal kerja dan investasi cenderung meningkat. Sementara itu, kredit konsumsi lebih banyak dipengaruhi oleh keyakinan konsumen dan stabilitas harga barang. Tahun 2022 menjadi momen puncak karena hampir seluruh sektor menunjukkan perbaikan kinerja, yang tercermin dari melonjaknya pertumbuhan kredit. Di sisi lain, pada 2023 bank mulai sedikit menahan laju kredit agar tetap selaras dengan ekspektasi risiko. Hal ini merupakan bagian dari strategi penyaluran yang lebih hati-hati.

Pertumbuhan kredit yang cepat memang menguntungkan dari sisi pendapatan bunga, namun juga berisiko jika tidak disertai dengan kontrol kualitas kredit. Rasio NPL yang meningkat akibat ekspansi kredit yang agresif dapat menggerus profitabilitas dan memicu beban pencadangan. Oleh karena itu, pertumbuhan kredit perlu dikendalikan secara proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan manajemen risiko bank. Idealnya, bank tetap menyalurkan kredit ke sektor produktif dengan prospek pengembalian yang baik. Pendekatan seperti ini tidak hanya memperkuat portofolio kredit, tetapi juga menjaga

kepercayaan pasar terhadap bank. Stabilitas jangka panjang lebih penting daripada sekadar mengejar pertumbuhan angka.

Dengan melihat tren lima tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan kredit Indonesia mengalami fase pemulihan yang kuat pasca-pandemi. Pertumbuhan yang moderat pada 2023 bukanlah tanda pelemahan, melainkan bagian dari keseimbangan antara ekspansi dan kehati-hatian. Selama pertumbuhan kredit tetap dalam batas wajar dan disertai pengelolaan risiko yang baik, maka fungsinya sebagai pendorong ekonomi akan tetap berjalan optimal. Hal yang terpenting adalah menjaga agar pertumbuhan tersebut tidak mengorbankan kualitas aset dan stabilitas bank. Dengan strategi yang bijak, bank mampu berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Kredit yang tumbuh sehat adalah fondasi penting bagi ketahanan perbankan Indonesia.

Dalam penelitian ini, pertumbuhan kredit tidak diukur secara langsung menggunakan rasio pertumbuhan kredit tahunan, melainkan diproksikan melalui Loan to Deposit Ratio (LDR). Rasio LDR mencerminkan tingkat intermediasi perbankan melalui kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga menjadi kredit, sehingga dapat menggambarkan dinamika ekspansi kredit sekaligus kondisi likuiditas bank. Oleh karena itu, penggunaan LDR dalam penelitian ini digunakan sebagai indikator yang merepresentasikan aktivitas pertumbuhan kredit dalam kerangka fungsi intermediasi perbankan.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah lembaga keuangan daerah yang memiliki fungsi penting sebagai penyedia pembiayaan lokal dan sebagai penggerak intermediasi keuangan di tingkat provinsi. Sebagai bagian dari sistem

perbankan nasional, BPD menyalurkan kredit kepada sektor usaha daerah dan rumah tangga, yang pada banyak kasus tidak terjangkau oleh bank umum besar. Oleh karena itu, dinamika pertumbuhan kredit pada BPD menjadi indikator penting bukan hanya bagi bank itu sendiri, tetapi juga bagi kesehatan ekonomi regional. Menghubungkan dengan pembahasan sebelumnya, pertumbuhan kredit yang tinggi tanpa disertai pengendalian risiko seperti NPL, LDR, efisiensi operasional (BOPO), dan margin bunga (NIM), bisa memicu ketidakstabilan zona lokal. Stabilitas BPD, yang diukur misalnya melalui Z-score, sangat bergantung pada keseimbangan antara ekspansi kredit dan kualitas aset. Karena itu, memahami hubungan ketiga komponen utama, yaitu risiko, kredit, dan stabilitas, khusus di BPD menjadi esensial untuk menilai ketahanan finansial mereka.

Penelitian empiris tentang BPD masih relatif terbatas dibanding bank umum, meski terdapat beberapa studi yang menguji dampak rasio keuangan terhadap profitabilitas atau risiko kredit. Setyarini (2020) menemukan bahwa NPL, LDR, BOPO, dan NIM secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas BPD, meskipun dalam analisis parsial LDR tidak signifikan terhadap ROA. Selain itu, Pratama (2021) memperkuat temuan ini dengan studi pada bank go-public termasuk BPD, menunjukkan bahwa BOPO dan LDR tetap signifikan parsial terhadap ROA, walaupun NPL dan NIM tidak. Temuan tersebut menggarisbawahi relevansi efisiensi operasional dan likuiditas dalam profitabilitas bank Indonesia.

Disisi lain, studi oleh Awaloedin et al. (2023) dengan sampel 30 perusahaan mencatat bahwa NPL dan BOPO keduanya negatif signifikan, sedangkan LDR positif signifikan, sehingga menguatkan bahwa peran NPL bisa berubah

tergantung struktur likuiditas dan efisiensi operasional bank. Noor & Suhendra (2024) menambahkan bahwa NIM sebagai variabel intervening memperkuat hubungannya, menunjukkan bahwa BOPO dan LDR negatif berpengaruh, sementara NPL tetap tidak signifikan secara langsung terhadap ROA, namun NIM berperan sebagai mediator positif yang signifikan.

Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara langsung menguji pengaruh pertumbuhan kredit terhadap stabilitas BPD, baik secara langsung maupun melalui jalur mediasi risiko (NPL, BOPO, NIM, LDR). Studi-studi yang ada umumnya berfokus pada profitabilitas sebagai outcome, bukan stabilitas (Z-score), dan belum memasukkan hubungan antara tingkat ekspansi kredit dan ketahanan bank daerah. Lebih lanjut, menemukan bahwa NPL dan BOPO sering berpengaruh signifikan terhadap kinerja atau risiko kredit, sementara LDR sering tidak berpengaruh parsial, menciptakan gap dalam pemahaman tentang variabel mana yang benar-benar membentuk stabilitas. Keunikan BPD sebagai lembaga lokal dengan karakteristik intermediasi berbeda dari bank umum juga belum banyak dikaji dalam kerangka hubungan risiko–kredit–stabilitas.

Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa BPD memiliki peran strategis dalam menyalurkan kredit ke sektor daerah dan menopang pertumbuhan ekonomi lokal, namun risiko keuangan mereka kerap kurang diperhatikan. Dengan mengkaji bagaimana pertumbuhan kredit berdampak pada stabilitas BPD—baik langsung maupun melalui risiko—penelitian ini memberikan wawasan penting bagi manajemen BPD untuk meningkatkan ketahanan jangka panjang. Temuan empiris yang dihasilkan dapat membantu manajer dan regulator memahami

indikator mana yang perlu dikedepankan dalam membangun stabilitas, sehingga BPD tidak hanya tumbuh dari sisi volume kredit, tetapi juga kuat dari sisi fondasi risiko.

Selain itu, hasil penelitian ini akan mengisi kekosongan literatur ilmiah mengenai tata kelola risiko dan intermediasi pada bank daerah. Kebanyakan studi sebelumnya berfokus pada profitabilitas atau pertumbuhan kredit, tanpa menyentuh aspek stabilitas sebagai outcome. Dengan fokus pada BPD, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam literatur perbankan daerah Indonesia—sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan peningkatan kapasitas pengelolaan risiko. Temuan ini berpotensi menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan internal BPD maupun pedoman pengawasan oleh OJK dan BI khusus untuk bank daerah.

Kebaharuan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi analisis risiko perbankan dan pertumbuhan kredit dalam menjelaskan stabilitas Bank Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan stabilitas berbasis Z-score. Penelitian sebelumnya umumnya menempatkan profitabilitas sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian ini menggunakan stabilitas bank sebagai indikator utama ketahanan keuangan. Selain itu, pertumbuhan kredit dalam penelitian ini direpresentasikan melalui Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai indikator fungsi intermediasi, sehingga memungkinkan analisis simultan antara ekspansi kredit dan profil risiko bank dalam satu kerangka empiris. Fokus khusus pada Bank Pembangunan Daerah juga memberikan perspektif baru karena karakteristik

intermediasi dan struktur risiko BPD berbeda dengan bank umum nasional yang lebih banyak diteliti sebelumnya.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada tiga aspek utama. Pertama, kontribusi teoritis, yaitu memperkaya literatur mengenai stabilitas perbankan dengan mengintegrasikan risiko bank dan pertumbuhan kredit dalam satu model empiris berbasis stabilitas. Kedua, kontribusi metodologis, melalui penggunaan analisis regresi data panel yang mampu menangkap variasi antar bank dan antar periode waktu secara simultan dalam menjelaskan stabilitas Bank Pembangunan Daerah. Ketiga, kontribusi praktis, yaitu memberikan referensi bagi manajemen BPD dan regulator dalam merumuskan strategi pengelolaan risiko dan kebijakan intermediasi kredit yang seimbang guna menjaga stabilitas sistem keuangan daerah secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia dengan mempertimbangkan dinamika kondisi ekonomi sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis pengaruh risiko perbankan yang meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional yang diukur melalui rasio BOPO, serta risiko profitabilitas yang diukur melalui rasio NIM, bersama dengan pertumbuhan kredit sebagai bagian dari fungsi intermediasi keuangan terhadap stabilitas bank.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi data panel untuk menguji hubungan antara variabel risiko dan pertumbuhan kredit terhadap stabilitas Bank Pembangunan Daerah pada periode 2020–2023.

Pemilihan rentang waktu tersebut bertujuan untuk menangkap dinamika kinerja bank pada masa tekanan ekonomi akibat pandemi maupun pada fase pemulihan ekonomi, sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang berperan dalam menjaga stabilitas bank.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris bagi penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas intermediasi kredit, serta perumusan strategi tata kelola yang adaptif di lingkungan Bank Pembangunan Daerah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara risiko perbankan, pertumbuhan kredit, dan stabilitas bank, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat ketahanan sistem keuangan daerah secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian yang berjudul **“Pengaruh Risiko dan Pertumbuhan Kredit terhadap Stabilitas Bank Pembangunan Daerah.”**

1.2 Perumusan Masalah

Untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas sistem keuangan merupakan aspek yang sangat penting. Perbankan berperan sentral dalam menjaga keseimbangan ini, terutama melalui fungsi intermediasi dan manajemen risiko yang efektif. Dalam konteks Indonesia, Bank Pembangunan Daerah (BPD) menghadapi dinamika yang kompleks karena perannya yang strategis di tingkat lokal. Berbagai risiko internal seperti kredit bermasalah, likuiditas terbatas, efisiensi operasional rendah, hingga fluktuasi margin bunga menjadi faktor yang memengaruhi stabilitasnya. Di sisi lain, pertumbuhan kredit yang agresif—meski penting untuk mendorong pembangunan—juga membawa potensi tekanan

terhadap kualitas aset dan ketahanan keuangan. Kompleksitas inilah yang mendorong perlunya pemahaman lebih mendalam terhadap hubungan antara risiko, pertumbuhan kredit, dan stabilitas BPD.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara empiris keterkaitan antara risiko perbankan—yang direpresentasikan oleh LDR, NPL, BOPO, dan NIM—dengan pertumbuhan kredit dalam memengaruhi stabilitas Bank Pembangunan Daerah. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar tentang sejauh mana risiko dan ekspansi kredit berkontribusi terhadap ketahanan finansial BPD. Analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang paling signifikan serta bagaimana interaksi di antaranya berdampak terhadap kestabilan bank. Dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan sistem keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting:

1. Apakah risiko likuiditas (LDR) berpengaruh terhadap stabilitas bank pembangunan daerah?
2. Apakah risiko kredit (NPL) berpengaruh terhadap stabilitas bank pembangunan daerah?
3. Apakah risiko operasional (BOPO) berpengaruh terhadap stabilitas bank pembangunan daerah?
4. Apakah risiko profitabilitas (NIM) berpengaruh terhadap stabilitas bank pembangunan daerah?

5. Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR), Non-Performing Loan (NPL), BOPO, dan Net Interest Margin (NIM) secara simultan berpengaruh terhadap stabilitas Bank Pembangunan Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penelitian paparkan diatas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian ini dilakukan, antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas (LDR) terhadap stabilitas bank pembangunan daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh risiko kredit (NPL) terhadap stabilitas bank pembangunan daerah.
3. Untuk menganalisis pengaruh risiko operasional (BOPO) terhadap stabilitas bank pembangunan daerah.
4. Untuk menganalisis pengaruh risiko profitabilitas (NIM) terhadap stabilitas bank pembangunan daerah.
5. Untuk menganalisis pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR), Non-Performing Loan (NPL), BOPO, dan Net Interest Margin (NIM) secara simultan terhadap stabilitas Bank Pembangunan Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi penerapan kebijakan di sektor perbankan Indonesia. Secara lebih rinci, manfaat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

a. Kontribusi bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur ilmiah terkait stabilitas perbankan dan manajemen risiko di Indonesia, khususnya pada bank pembangunan daerah (BPD). Temuan-temuan yang dihasilkan dapat menjadi referensi penting bagi para peneliti, dosen, dan mahasiswa yang meneliti topik serupa di bidang keuangan, perbankan, dan ekonomi regional.

b. Pengembangan Ilmu

Penelitian ini mengembangkan pemahaman teoretis mengenai bagaimana berbagai risiko (likuiditas, kredit, operasional, dan margin keuntungan) mempengaruhi stabilitas bank, serta bagaimana kepemilikan pemerintah bertindak sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian ini memperkaya teori agency, stewardship, dan good governance dalam konteks lembaga keuangan milik negara.

c. Bahan Ajar dan Diskusi Akademik

Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa pascasarjana sebagai sumber pembelajaran empiris, baik dalam diskusi kelas maupun dalam penulisan tesis, skripsi, maupun karya ilmiah lainnya di bidang akuntansi, manajemen keuangan, dan perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen BPD

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman berbasis data mengenai pengaruh risiko terhadap stabilitas bank serta strategi mitigasinya, serta

menjadi masukan strategis dalam menyusun kebijakan manajemen risiko dan meningkatkan efisiensi operasional bank.

b. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kebijakan kepada lembaga seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merumuskan regulasi yang lebih tepat guna bagi BPD, khususnya terkait pengelolaan risiko dan implikasi kepemilikan pemerintah terhadap stabilitas keuangan.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini memberikan wawasan kepada pemangku kepentingan di tingkat pemerintah daerah sebagai pemilik BPD, agar memahami konsekuensi dari intervensi maupun dukungan fiskal terhadap stabilitas dan kinerja keuangan BPD.

d. Bagi Praktisi Perbankan dan Auditor

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam melakukan evaluasi risiko dan perencanaan strategis keuangan, serta bahan pertimbangan dalam praktik audit risiko, manajemen aset, dan kepatuhan perbankan.

e. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap pentingnya stabilitas perbankan daerah dan bagaimana risiko internal serta peran pemerintah dapat memengaruhi keberlanjutan layanan keuangan yang andal dan aman.